



Inovasi Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Desa Lumbungsari Kecamatan Lumbang Kabupaten Ciamis

Wahyu Rahmat Hidayah^{1*}, Erlan Suwarlan², Kiki Endah³

^{1,2,3} Universitas Galuh, Indonesia

Alamat: Jl. R. E. Martadinata No. 150 Ciamis, 46274 Jawa Barat

Korespondensi penulis : wahyu_rahmat@student.unigal.ac.id

Abstract. *This research is motivated by the suboptimal Innovation of Village Government in Realizing Food Security in Lumbungsari Village, Lumbang District, Ciamis Regency. The purpose of this study is to determine the Innovation of Village Government in Realizing Food Security in Lumbungsari Village, Lumbang District, Ciamis Regency. The method used in this study is a qualitative descriptive research method. Data collection techniques include: Observation, Interviews and documentation. Data processing techniques in this study are: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that the Innovation of Village Government in Realizing Food Security has not been running optimally. From the results of the observation, several indicators of problems were found related to the Innovation of Village Government in Realizing Food Security in Lumbungsari Village, Lumbang District, Ciamis Regency, including lack of funds to support food security, lack of adequate facilities and infrastructure to support agricultural activities, low public awareness to achieve new innovations, and low community skills in using information technology and applications.*

Keywords: *Innovation, Village Government, Food Security.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya Inovasi Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Desa Lumbungsari Kecamatan Lumbang Kabupaten Ciamis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Inovasi Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Desa Lumbungsari Kecamatan Lumbang Kabupaten Ciamis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yakni metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi: Observasi, Wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa Inovasi Pemerintah Desa dalam Mewujudkan ketahanan pangan belum berjalan dengan optimal. Dari hasil observasi tersebut ditemukan beberapa indikator permasalahan terkait dengan Inovasi Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Desa Lumbungsari Kecamatan Lumbang Kabupaten Ciamis antara lain kurangnya dana untuk menunjang ketahanan pangan, minimnya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan pertanian, rendahnya kesadaran masyarakat untuk mencapai inovasi baru, dan rendahnya keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan aplikasi.

Kata kunci: Inovasi, Pemerintah Desa, Ketahanan Pangan.

1. LATAR BELAKANG

Pangan adalah komoditas yang sangat penting dan strategis bagi bangsa Indonesia karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang wajib dipenuhi secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat seperti yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan. Dalam UU tersebut disebutkan Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, sementara masyarakat menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan, perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli mereka.

Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun 1996 menegaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang terus berkembang dari waktu ke waktu, upaya penyediaan pangan dilakukan dengan mengembangkan sistem produksi pangan yang berbasis pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal, mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan, mengembangkan teknologi produksi pangan, mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan dan mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga dijelaskan bahwa untuk memastikan ketersediaan pangan merata di seluruh wilayah, dilakukan distribusi pangan dengan mengembangkan sistem distribusi yang efisien, mampu menjaga keamanan, kualitas, dan nilai gizi pangan, serta menjamin keamanan dalam proses distribusi pangan.

Disamping itu, upaya untuk memperkuat ketahanan pangan dilakukan melalui diversifikasi pangan dengan mempertimbangkan potensi sumber daya, kelembagaan, serta kearifan lokal, yang didukung oleh peningkatan teknologi pengolahan dan produksi pangan, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi berbagai jenis pangan bergizi seimbang. Peraturan Pemerintah tentang Ketahanan Pangan juga menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan di bidang pangan, penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi pangan, serta kegiatan penyuluhan. Selain itu, kerja sama internasional turut dilakukan dalam berbagai aspek, seperti produksi, perdagangan, distribusi, cadangan pangan, penanganan permasalahan pangan, serta riset dan teknologi pangan.

Pengelolaan ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga, tetapi juga berdampak pada ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, politik, serta keamanan atau ketahanan nasional. Berbagai lembaga di sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting karena pengelolaan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian, melainkan juga melibatkan banyak instansi lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang baik agar semua instansi dapat bekerja sama dengan efektif dan saling mendukung dalam melaksanakan tugasnya. (Hendayana dan Alfons, 2017).

Fokus konsep ketahanan pangan terdapat pada pemenuhan kebutuhan konsumen pangan. Prioritas Nasional Ketahanan Pangan bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan sepanjang musim sehingga semua orang dengan leluasa dapat mengaksesnya, dengan jumlah, mutu, dan jenis nutrisi yang mencukupi serta dapat diterima secara budaya. Hal ini membuka peluang terbukanya perdagangan luar negeri, baik bilateral maupun multilateral, sehingga

krisis pangan akibat kurang atau berlebihnya *demand/supply* komoditas pertanian antar negara dapat diatasi dengan ekspor dan impor yang memanfaatkan sumber daya antar negara secara lebih efisien (Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik, 2020). Ketahanan pangan adalah salah satu pilar utama pembangunan nasional yang menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat (Fao, 2003; Gibson, 2012). Namun, ketersediaan pangan di banyak desa seringkali terhambat oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan infrastruktur, akses pasar, dan informasi pertanian yang relevan.

Kebijakan umum ketahanan pangan tahun 2014 menempatkan empat pilar utama, yaitu: (1) meningkatkan ketersediaan pangan; (2) mengembangkan sistem distribusi pangan; (3) meningkatkan kualitas konsumsi pangan; dan (4) membangun sistem pendukung ketahanan pangan.

Ketahanan pangan terwujud dari hasil kerja suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem yang saling berinteraksi. Subsistem ketersediaan mencakup pengaturan agar penyediaan pangan tetap stabil dan berkelanjutan. Ketersediaan pangan meliputi produksi, stok, impor, dan ekspor yang perlu dikelola dengan baik agar meskipun produksi pangan bersifat musiman, pangan yang tersedia untuk keluarga tetap cukup dan stabil sepanjang waktu. Subsistem distribusi mencakup upaya memperlancar peredaran pangan antar wilayah dan waktu serta menjaga stabilitas harga pangan. Tujuan dari hal ini adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang memadai. Sementara itu, subsistem konsumsi berkaitan dengan pendidikan masyarakat agar memiliki pengetahuan yang baik tentang gizi dan kesehatan, sehingga dapat mengatur konsumsi secara optimal sesuai kebutuhan masing-masing individu.

Ciamis merupakan Kabupaten di Jawa Barat. Ciamis tentunya perlu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya, karena kegiatan ekonomi suatu daerah dapat berjalan dengan baik apabila kebutuhan pangan masyarakatnya dapat terpenuhi dan menjadikan daerahnya sebagai daerah yang layak pangan. Kebutuhan pangan akan terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, karena pangan adalah kebutuhan manusia yang dibutuhkan setiap hari.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa terdapat permasalahan dimana Inovasi Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Desa Lumbungsari Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis belum optimal, hal ini dilihat dari adanya indikator permasalahan yang terjadi diantaranya : (a) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola lahan. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan lahan yang kurang produktif, yang disebabkan oleh kurangnya sarana – prasarana dan pemahaman tentang

pentingnya ketahanan pangan. (b) Rendahnya keterampilan SDM dalam mengoprasikan teknologi pertanian hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang tidak mampu mengoprasikan teknologi modern sehingga menghambat efisiensi dalam pengelolaan lahan dan ketahanan pangan. (c) Keterbatasan dana untuk pembangunan ketahanan pangan. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya dana dalam proses pembangunan yang menghambat peningkatan ketahanan pangan.

Mengingat program ketahanan pangan menjadi salah satu program penting dalam memperbaiki gizi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, maka berdasarkan fenomena permasalahan yang telah peneliti paparkan diatas, peneliti tertarik untuk menuangkannya ke dalam artikel yang berjudul : **“Inovasi Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Desa Lumbungsari Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis”**.

2. KAJIAN TEORITIS

Inovasi

Inovasi berasal dari kata *innovate* dalam Bahasa Inggris yang berarti berubah menjadi sesuatu yang baru. Berdasarkan makna dasarnya, inovasi dapat diartikan sebagai proses perubahan dari suatu hal menuju sesuatu yang dianggap lebih baik atau memiliki nilai lebih sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Inovasi di definisikan sebagai suatu aktivitas yang mencakup keseluruhan proses dalam menciptakan dan menyajikan barang atau jasa yang bersifat baru, lebih unggul, atau lebih terjangkau dibandingkan dengan produk atau layanan yang sudah ada sebelumnya. Pengertian ini menekankan bahwa pemahaman inovasi sebagai sebuah kegiatan (proses) penemuan (*invention*) (Crowdhury, 2020; Suwarno, 2008).

Istilah Inovasi selalu diartikan berbeda – beda oleh beberapa para ahli. Menurut Trott (2008) Inovasi merupakan inti atau pusat dari seluruh kegiatan dalam sebuah perusahaan karena perannya sangat penting untuk keberlangsungan perusahaan. Inovasi mencakup pengelolaan berbagai aktivitas seperti proses penciptaan ide, pengembangan teknologi, produksi, serta pemasaran produk baru atau yang telah dikembangkan.

Inovasi merupakan keniscayaan untuk memenuhi tuntutan publik yang semakin tinggi, inovasi adalah jawaban paling cerdas untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Mengelola inovasi dapat dilakukan melalui lima tahap utama, yakni koleksi dan seleksi inovasi, inkubasi, desiminasi inovasi, adopsi/replikasi/modifikasi inovasi, serta aktualisasi inovasi. (Kiki, 2021).

Menurut Ellitian dan Anatan (2009), secara singkat inovasi diartikan sebagai “perubahan yang dilakukan dalam organisasi yang mencakup kreatifitas dalam menciptakan produk baru, jasa, ide, atau proses, baik yang sudah ada dalam organisasi maupun berkembang dari luar organisasi”.

Sementara Rosenfeld dalam Sutarno (2012:132), “inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru”.

Sedangkan menurut Kiki (2021): “Inovasi adalah suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Pemimpin yang selalu berinovasi, pemimpin tersebut dapat dikatakan sebagai seorang pemimpin yang inovatif”.

Menurut UU No. 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi menyatakan bahwa: “Inovasi yaitu kegiatan penelitian, pengembangan, atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi”.

Dalam proses inovasi organisasi, Greenberg & Baron (2005) menekankan bahwa inovasi tidak hanya bergantung pada aktivitas individu, tetapi juga pada aktivitas kelompok, sumber daya, dan keterampilan yang dimiliki bersama. Proses inovasi melibatkan motivasi, aktivitas individu dan kelompok, serta kolaborasi untuk menghasilkan dan mengimplementasikan gagasan baru.

Alberti and Bertucci (dalam Rahman,2020:78) menjelaskan bahwa inovasi di sektor publik terkait dengan beberapa hal berikut, yakni: *Effective leadership* (kepemimpinan yang efektif); *Promotion of team work and partnership* (kerja sama tim); *innovation must be oriented to achieving measurable progres* (inovasi harus menghasilkan kemajuan yang terukur); *and it is very importance to include innovation in executive program* (memasukkan inovasi dalam program eksekutif). Untuk lebih memahami maksud dari faktor-faktor di atas, akan dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Kepemimpinan yang efektif. Proses inovasi membutuhkan pemimpin yang mampu melakukan perubahan, mampu menyadarkan banyak pihak akan arti penting inovasi, dan mampu menggerakkan serta memberi teladan yang mendukung proses inovasi.
2. Pengembangan sumber daya manusia (SDM). Pengembangan SDM diperlukan sebagai bekal bagi inovator untuk memahami permasalahan dan mencarikan solusinya, serta mendesain inovasi.
3. Budaya organisasi. Budaya dapat memiliki pengaruh yang bermakna pada sikap dan perilaku pegawai, terutama karena budaya melakukan sejumlah fungsi dalam suatu

organisasi. Budaya yang menekankan kreativitas dan inovasi tentu memberikan dorongan bagi anggota organisasi untuk mengeksekusi setiap program dan aktivitas keseharian organisasi secara kreatif dan inovatif.

4. Kerja sama tim. Pengembangan inovasi membutuhkan kerja sama dalam tim, karena sistem inovasi pada dasarnya bukanlah pekerjaan individual. Pembelajaran tim dibutuhkan guna membangun tim yang selaras, yakni sebuah tim sinergis yang memadukan seluruh potensi anggota tim pada tujuan dan komitmen yang sama.
5. Jejaring dan kemitraan. Demi menciptakan suatu inovasi dibutuhkan jejaring dan kemitraan yang dijalin diluar institusi. Hal ini mengingat di dalam institusi terbatas pada beberapa bidang keahlian saja.

Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan didefinisikan sebagai: “Ketahanan pangan terjadi apabila semua orang secara terus menerus, baik secara fisik, sosial, dan ekonomi mempunyai akses untuk pangan yang memadai/cukup, bergizi dan aman, yang memenuhi kebutuhan pangan mereka dan pilihan untuk hidup aktif dan sehat”. (Hakim 2014).

Di Indonesia konsep ketahanan pangan dituangkan dalam Undang-undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan. Dalam definisi tersebut ditegaskan lima bagian dalam konsep tentang ketahanan pangan tersebut, yaitu:

- a) Terpenuhinya pangan yang cukup dari segi jumlah (aspek ketersediaan/ *availability*), yaitu bahwasanya pangan ada dan jumlahnya mencukupi bagi masyarakat, baik yang bersifat nabati maupun hewani.
- b) Terpenuhinya mutu pangan (aspek kesehatan/*healthy*), yaitu bahwasanya pangan yang ada atau diadakan memenuhi standar mutu yang baik dan layak untuk dikonsumsi manusia. Kaitannya dalam pemenuhan kebutuhan gizi mencukupi kebutuhan akan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral.
- c) Aman (aspek kesehatan/*healthy*), yaitu bahwasanya pangan yang dikonsumsi memenuhi standar kesehatan bagi tubuh dan tidak mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan manusia.
- d) Merata (aspek distribusi/*distribution*), yaitu bahwasanya pangan terjamin untuk distribusi secara merata ke setiap daerah sehingga pangan mudah diperoleh masyarakat.
- e) Terjangkau (aspek akses), yaitu bahwasanya pangan memungkinkan untuk diperoleh masyarakat dengan mudah dan harga wajar.

Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization, WHO) mengemukakan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, aksesibilitas pangan, dan pemanfaatan

pangan (utilitas). Ketersediaan pangan menyangkut kemampuan individu memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasarnya. Sementara itu, aksesibilitas pangan berkaitan dengan cara seseorang mendapatkan bahan pangan. Sedangkan utilitas pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan berkualitas (Hakim 2014).

Secara keseluruhan, ketahanan pangan merupakan kondisi di mana setiap orang secara terus-menerus memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, bergizi, aman, serta berkualitas, yang mampu memenuhi kebutuhan dasar dan mendukung gaya hidup aktif dan sehat.

Inovasi Pemerintah Desa dalam mewujudkan ketahanan Pangan

Peran serta kelembagaan Desa dalam hal ketahanan pangan di Desa sudah dicantumkan dalam Kepmendesa no. 82 Tahun 2022. Ketahanan pangan di desa diselenggarakan dengan mengutamakan pendayagunaan segala sumber daya pembangunan yang ada di desa untuk membangun pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan yang berkelanjutan. Desa harus mampu membangun ketahanan pangan agar tidak ada seorang pun masyarakat desa yang kelaparan.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang mantap dan berkesinambungan, terdapat 3 (tiga) komponen yang harus diperhatikan, yaitu : 1) ketersediaan pangan yang cukup dan merata; 2) keterjangkauan pangan yang efektif dan efisien; dan 3) konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan halal.

Adapun menurut Kepmendesa No. 82 Tahun 2022, inovasi yang dilakukan oleh pemerintah desa memiliki peran penting dalam mencapai ketahanan pangan. Beberapa inovasi tersebut meliputi: a) partisipasi aktif warga desa dalam pendataan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan ketahanan pangan di tingkat desa; b) semangat gotong royong dalam pengelolaan ketahanan pangan dengan mengedepankan budaya saling membantu dan bekerja sama secara setara; c) intensifikasi pemanfaatan lahan milik masyarakat sebagai sumber produksi pangan; d) pengembangan intensifikasi lahan serta diversifikasi tanaman untuk memaksimalkan penggunaan lahan; e) pengolahan hasil pangan menjadi makanan yang sehat dan bergizi.

Selain itu, inovasi pada kelembagaan pertanian juga turut berperan penting, terutama dalam pengembangan usaha tani dan lembaga yang mendukung ketahanan pangan. Dengan berbagai inovasi tersebut, diharapkan ketahanan pangan di desa dapat tercapai secara optimal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana inovasi Pemerintah Desa dalam mewujudkan ketahanan pangan di Desa Lumbungsari Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mencakup observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini terbagi dalam dua bagian yang saling menopang untuk menciptakan suatu penelitian yang efektif sesuai dengan permasalahan yang diteliti, yaitu sumber data yang sifatnya primer dan sumber data yang bersifat sekunder. Data primer diperoleh melalui proses wawancara secara mendalam antara peneliti dan informan terpilih sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen (resmi dan tidak resmi) seperti buku, perundang – undangan, berbagai media dan profil lokasi penelitian yang memiliki keterkaitan dengan masalah dalam penelitian. Adapun aktifitas analisis data dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga data yang ada menjadi jenuh. Teknik tersebut yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan serta verifikasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pada bab ini berkaitan dengan hasil penelitian Inovasi Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Desa Lumbungsari Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis. Deskripsi hasil penelitian dengan menguraikan hasil penelitian dengan analisis faktor – faktor yang dapat mempengaruhi Inovasi Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Desa Lumbungsari Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis yang meliputi faktor : Kepemimpinan yang efektif, pengembangan sumber daya manusia, budaya organisasi, kerja sama tim, jejaring dan kemitraan. Hasil penelitian dapat dilihat uraiannya sebagai berikut :

Kepemimpinan yang efektif

Menurut Alberti and Bertucci (dalam Rahman, 2020:78) Kepemimpinan yang efektif : Proses inovasi membutuhkan pemimpin yang mampu melakukan perubahan, mampu menyadarkan banyak pihak akan arti penting inovasi, dan mampu menggerakkan serta memberi teladan yang mendukung proses inovasi.

Pada bagian Kepemimpinan yang efektif terdapat 3 indikator diantaranya penyadaran masyarakat, menggerakkan masyarakat, dan inovasi yang dilakukan. Untuk mengetahui lebih lanjut ketiga indikator tersebut, maka peneliti sajikan hasil penelitian berikut ini.

1. Penyadaran masyarakat dalam program ketahanan pangan

Penyadaran masyarakat itu sangatlah penting untuk dilakukan guna meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam program penguatan

ketahanan pangan. Pemerintah Desa dan masyarakat harus berupaya saling mendukung dalam meningkatkan program ketahanan pangan seperti mengelola lahan yang kurang produktif.

Adapun hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya dana dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam proses pembangunan untuk menunjang dan meningkatkan program ketahanan pangan yang menyebabkan program penguatan ketahanan pangan ini kurang berjalan dengan efektif.

Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu Pemerintah Desa Lumbungsari perlu meningkatkan kesadaran masyarakat, mencari sumber pendanaan alternatif, mendorong partisipasi masyarakat, mengembangkan inovasi pertanian, dan melakukan monitoring serta evaluasi secara berkala untuk meningkatkan efektivitas program ketahanan pangan dan menciptakan sinergi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat.

2. Menggerakkan masyarakat dalam program ketahanan pangan

Menggerakkan masyarakat dalam program ketahanan pangan berarti melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya menjaga ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan agar tercipta ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Adapun hambatan yang dihadapi yaitu berupa kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan pengelolaan lahan sehingga partisipasi masyarakat berkurang untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah Desa Lumbungsari perlu meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta memperkuat program edukasi, pelatihan, dan pendampingan secara berkelanjutan agar masyarakat lebih termotivasi dan mampu berkontribusi secara optimal dalam pengelolaan lahan desa.

3. Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam program ketahanan pangan

Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam program ketahanan pangan perlu dirancang secara tepat sasaran, berbasis potensi lokal, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat agar mampu meningkatkan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan yang sehat, aman, serta bergizi, sehingga ketahanan pangan di tingkat desa dapat terwujud secara mandiri dan berkelanjutan. Pemerintah Desa Lumbungsari harus memiliki inovasi supaya dapat mengelola lahan yang belum produktif menjadi lahan yang produktif secara optimal dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masyarakat desa.

Adapun hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran masyarakat yang menyebabkan masyarakat kurang aktif dalam mengelola lahan yang belum produktif, serta belum banyak yang menerapkan cara-cara baru dalam pertanian.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu pemerintah Desa Lumbungsari perlu meningkatkan strategi pendekatan yang lebih efektif dan berkelanjutan agar masyarakat terdorong untuk ikut serta secara aktif dalam mendukung ketahanan pangan di desanya.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Menurut Alberti and Bertucci (dalam Rahman,2020:78) Pengembangan SDM diperlukan sebagai bekal bagi inovator untuk memahami permasalahan dan mencari solusi, serta mendesain inovasi.

Pada bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia terdapat 3 indikator diantaranya bimbingan penggunaan akses Teknologi, Penempatan Orang Ahli, dan Kapabilitas SDM, Untuk mengetahui lebih lanjut dari ketiga indikator tersebut, maka peneliti sajikan hasil penelitian berikut ini.

1. Adanya bimbingan kepada masyarakat terkait penggunaan teknologi ketahanan pangan

Bimbingan terkait penggunaan akses teknologi kepada masyarakat penting dalam meningkatkan ketahanan pangan di Desa Lumbungsari. Teknologi yang semakin canggih memberikan kemudahan dalam proses pengelolaan lahan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas pertanian.

Adapun hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya kemampuan sebagian masyarakat dalam mengoperasikan teknologi yang mengakibatkan rendahnya efektivitas penggunaan teknologi dalam meningkatkan produktivitas pertanian dalam ketahanan pangan dan hasil yang diperoleh tidak optimal, sehingga kebutuhan pangan masyarakat tidak dapat terpenuhi dengan baik.

Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Desa Lumbungsari perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengoperasikan teknologi, seperti penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan yang terstruktur, peningkatan akses informasi mengenai teknologi pertanian, serta pembentukan kelompok tani yang dapat saling berbagi pengetahuan.

2. Penempatan orang ahli untuk program ketahanan pangan

Penempatan orang yang ahli harus dilakukan karena mereka memiliki peran penting dalam pengelolaan ketahanan pangan yang efektif dan tepat sasaran. Para ahli

mampu merancang strategi, menganalisis potensi dan permasalahan pangan di wilayah tertentu, serta memberikan solusi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan keterlibatan tenaga profesional, pelaksanaan program ketahanan pangan dapat berjalan lebih terarah, efisien, dan berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menjaga ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan secara optimal.

Hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya rasa percaya diri dari para tenaga ahli tersebut sehingga kinerja mereka kurang maksimal dan berdampak pada efektivitas pengelolaan ketahanan pangan di desa. Hambatan ini juga berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat dan pihak terkait terhadap kemampuan tenaga ahli, yang pada akhirnya dapat menghambat keberhasilan program ketahanan pangan secara keseluruhan.

Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Desa Lumbungsari perlu memberikan dukungan yang lebih intensif berupa pendampingan dan motivasi untuk meningkatkan rasa percaya diri para tenaga ahli, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih optimal dan program ketahanan pangan dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.

3. Kapabilitas Sumber Daya Manusia dalam ketahanan pangan

Kapabilitas sumber daya manusia (SDM) sangat penting dalam mencapai ketahanan pangan di Desa Lumbungsari. SDM yang dimiliki masyarakat Desa Lumbungsari tidak semua sama rata sehingga produk yang diunggulkan dalam ketahanan pangan tidak sesuai dengan capaian.

Adapun hambatan yang dihadapi yaitu rendahnya pendidikan dan rendahnya wawasan masyarakat sehingga pelaksanaan pelatihan dan pendidikan yang telah dirancang oleh Pemerintah Desa Lumbungsari belum dapat memberikan hasil yang optimal. Rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya wawasan masyarakat menyebabkan sebagian besar peserta pelatihan kurang mampu memahami materi yang diberikan secara menyeluruh, sehingga transfer pengetahuan dan keterampilan berjalan kurang efektif.

Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Desa Lumbungsari diharapkan dapat memperkuat program pelatihan dan pendidikan yang relevan, menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, menyediakan fasilitas pendukung yang memadai, serta melakukan evaluasi rutin agar kemampuan sumber daya manusia meningkat dan ketahanan pangan di desa dapat terwujud dengan baik.

Budaya dan organisasi

Menurut Alberti and Bertucci (dalam Rahman,2020:78) Budaya dan organisasi : Budaya dapat memiliki pengaruh yang bermakna pada sikap dan perilaku pegawai, terutama karena budaya melakukan sejumlah fungsi dalam suatu organisasi. Budaya yang menekankan kreativeitas dan inovasi tentu memberikan dorongan bagi anggota organisasi untuk mengeksekusi setiap program dan aktivitas keseharian organisasi secara kreatif dan inovatif.

1. Kreativitas masyarakat dalam mengelola program ketahanan pangan

Kreativitas merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan program ketahanan pangan di Desa Lumbungsari. Kreativitas dalam pengelolaan ketahanan pangan di Desa Lumbungsari, baik di bidang hewani (seperti ayam petelur) maupun nabati, sudah berjalan dengan baik dan menunjukkan hasil yang positif.

Adapun hambatan yang dihadapi yaitu adanya serangan virus pada hewan dan hama pada tanaman yang menyebabkan penurunan produktivitas serta kualitas hasil pertanian dan peternakan. Kondisi ini berpotensi mengganggu ketersediaan pangan dan menghambat pencapaian tujuan ketahanan pangan di desa.

Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Desa Lumbungsari perlu mengambil langkah strategis dengan meningkatkan koordinasi dan sinergi bersama dinas terkait seperti Dinas Balai Penyuluh Pertanian dan Dinas Pertanakan dan Perikanan untuk melakukan pengendalian hama dan penyakit secara efektif.

2. Adanya apresiasi dari pemerintah desa atas inovasi yang telah dilakukan masyarakat

Penghargaan atas inovasi sangat penting agar dapat memotivasi masyarakat dan pengelola dalam meningkatkan kualitas pengelolaan ketahanan pangan di Desa Lumbungsari. Dengan memberikan pengakuan kepada individu atau kelompok yang berhasil menciptakan solusi kreatif, diharapkan akan muncul lebih banyak inisiatif dan ide-ide baru yang dapat memperkuat ketahanan pangan.

Adapun hambatan yang dihadapi yaitu pengelolaan yang belum maksimal, di mana kurangnya bimbingan teknis dan pelatihan bagi para pengelola mengakibatkan hasil yang dicapai tidak sesuai dengan harapan.

Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Desa perlu fokus pada peningkatan kualitas pengelolaan melalui penyediaan pelatihan yang lebih intensif dan terstruktur, serta memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan masyarakat.

3. Sikap dan perilaku masyarakat dalam program ketahanan pangan

Sikap dan perilaku sangat berpengaruh untuk mendukung keberhasilan ketahanan pangan di Desa Lumbungsari. Sikap proaktif pemerintah desa dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program ketahanan pangan.

Hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya akses terhadap teknologi dan modal serta rendahnya partisipasi serta kesadaran masyarakat yang menyebabkan pelaksanaan program ketahanan pangan belum berjalan secara optimal

Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Desa Lumbungsari perlu meningkatkan dukungan berupa akses teknologi dan modal, memperkuat edukasi serta partisipasi masyarakat, serta mempererat koordinasi dengan dinas terkait agar sikap dan perilaku dalam mendukung ketahanan pangan dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

Kerjasama tim

Menurut Alberti and Bertucci (dalam Rahman,2020:78) Kerja sama tim : Pengembangan inovasi membutuhkan kerja sama dalam tim, karena sistem inovasi pada dasarnya bukanlah pekerjaan individual. Pembelajaran tim dibutuhkan guna membangun tim yang selaras, yakni sebuah tim sinergis yang memadukan seluruh potensi anggota tim pada tujuan dan komitmen yang sama.

Pada bagian Kerja Sama Tim terdapat 2 indikator yaitu kekompakan atau Solidaritas dan Komitmen pemerintah. Untuk mengetahui lebih lanjut ketiga indikator tersebut, maka peneliti sajikan hasil penelitian berikut ini.

1. Kekompakan atau solidaritas antara pemerintah desa dengan pengelola program ketahanan pangan

Kekompakan dan solidaritas yang kuat antara Pemerintah Desa Lumbungsari dan masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan program ketahanan pangan, karena kolaborasi yang erat ini memungkinkan terciptanya sinergi dalam pengelolaan sumber daya, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, serta memperkuat komitmen bersama untuk mencapai tujuan ketahanan pangan yang berkelanjutan di desa tersebut.

Hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam memanfaatkan teknologi yang berkembang dan masalah administrasi yang belum sepenuhnya teratasi, yang menyebabkan efektivitas program-program ketahanan pangan menjadi terhambat.

Adapun upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Desa Lumbungsari perlu melakukan upaya peningkatan pelatihan dan bimbingan teknis bagi

pengelola, serta penguatan koordinasi antara semua pihak terkait untuk mencapai kekompakan dan solidaritas yang lebih baik dalam mendukung program ketahanan pangan.

2. Komitmen pemerintah desa dalam program ketahanan pangan

Komitmen Pemerintah Desa Lumbungsari dalam pelaksanaan pembaharuan ketahanan pangan sudah terlihat melalui keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan yang berbasis musyawarah.

Hambatan yang dihadapi yaitu adanya ketidakstabilan hasil yang tidak konsisten dari tahun ke tahun dan variasi hasil yang berbeda-beda sehingga menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan pengelola, menghambat upaya untuk mencapai target ketahanan pangan yang diharapkan, serta mengurangi motivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program-program yang ada.

Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Desa Lumbungsari perlu meningkatkan efektivitas komitmennya dalam mewujudkan ketahanan pangan dengan cara memperkuat bimbingan teknis, melakukan evaluasi berkala, memperbaiki infrastruktur, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat agar hasil yang dicapai lebih konsisten dan memuaskan.

Jejaring dan kemitraan

Menurut Alberti and Bertucci (dalam Rahman,2020:78) Jejaring Kemitraan: Demi menciptakan suatu inovasi dibutuhkan jejaring dan kemitraan yang dijalin diluar institusi. Hal ini mengingat di dalam institusi terbatas pada beberapa bidang keahlian saja.

Pada bagian jejaring dan kemitraan terdapat 3 indikator diantaranya konsultasi pengembangan, penggunaan teknologi informasi, dan kerjasama Pemerintah Desa dengan pihak terkait.

Untuk mengetahui lebih lanjut ketiga indikator tersebut, maka peneliti sajikan hasil penelitian berikut ini.

1. Konsultasi pengembangan dengan dinas terkait ketahanan pangan

Konsultasi mengenai pengembangan ketahanan pangan sangatlah penting untuk meningkatkan capaian pendapatan masyarakat. Melalui konsultasi ini, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola sumber daya pangan secara lebih efektif.

Hambatan yang dihadapi yaitu adanya benturan waktu antara kegiatan konsultasi dengan aktivitas program lain yang juga penting, sehingga mengakibatkan kurangnya kesempatan untuk melakukan diskusi dan perencanaan yang efektif. Selain itu, hal ini

juga menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengembangan ketahanan pangan.

Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Desa Lumbungsari perlu mengadakan penjadwalan yang lebih baik dan fleksibel agar semua pihak dapat berpartisipasi secara optimal dalam konsultasi pengembangan.

2. Penggunaan teknologi informasi yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mempermudah penyampaian informasi

Penggunaan teknologi pada program ketahanan pangan di Desa Lumbungsari sangat diutamakan, terutama dengan memanfaatkan HP Android untuk mengakses aplikasi yang memberikan informasi terkini dan pengecekan harga.

Hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya keterampilan pengelola dalam menggunakan aplikasi yang tersedia, yang menyebabkan informasi yang seharusnya dapat diakses dengan cepat dan efisien tidak dimanfaatkan secara maksimal.

Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Desa perlu meningkatkan pelatihan dan pendampingan secara intensif agar masyarakat dapat menguasai penggunaan teknologi informasi dengan baik, sehingga dapat mendukung efektivitas program ketahanan pangan di desa.

3. Kerjasama pemerintah desa dengan pihak terkait

Pemerintah desa berupaya membangun sinergi yang kuat antara berbagai pihak terkait, sehingga tidak ada hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari koordinasi yang intensif antara perangkat desa, pengelola, dan masyarakat, serta pelaksanaan pelatihan dan pendampingan yang rutin untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program ketahanan pangan. Selain itu, pemanfaatan sumber daya desa secara optimal juga menjadi salah satu faktor kunci yang mendukung kelancaran kerja sama operasi ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Inovasi Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Desa Lumbungsari Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis secara keseluruhan masih belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan Pemerintah Desa Lumbungsari yang belum optimal dalam menjalankan tugasnya dilihat dari 5 dimensi. Pada dimensi kepemimpinan yang efektif dalam indikator kesadaran masyarakat, menggerakkan masyarakat dan inovasi yang dilakukan belum berjalan optimal. Pada dimensi pengembangan sumber daya

manusia dengan indikator bimbingan penggunaan akses teknologi, penempatan orang yang ahli dan kapabilitas SDM masih belum efektif. Pada dimensi Budaya organisasi dengan indikator kreativitas masyarakat, penghargaan atas inovasi serta sikap dan perilaku masyarakat belum berjalan optimal. Dan pada dimensi kerjasama tim dengan indikator kekompakan atau solidaritas dan komitmen pemerintah masih belum efektif. Sedangkan pada dimensi jejaring dan kemitraan dengan indikator konsultasi pengembangan dan penggunaan teknologi informasi masih belum optimal, tetapi dalam indikator kerjasama Pemerintah Desa dengan pihak terkait sudah berjalan optimal.

Adapun hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Lumbungsari dalam pelaksanaan inovasi antara lain kurangnya dana untuk menunjang ketahanan pangan, minimnya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan pertanian, rendahnya kesadaran masyarakat untuk mencapai inovasi baru dalam mengelola lahan tanah desa, rendahnya keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan aplikasi, kurangnya rasa percaya diri dari para tenaga ahli, rendahnya pendidikan masyarakat, hasil pertanian yang tidak konsisten setiap tahunnya, masalah administrasi dan koordinasi antar pihak, kurangnya pelatihan yang terstruktur, serta tantangan dalam mengelola lahan yang kurang produktif.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lumbungsari antara lain meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait, memanfaatkan sumber daya secara optimal, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat agar mereka lebih aktif berkontribusi dalam program ketahanan pangan, merencanakan pembuatan jadwal konsultasi yang teratur untuk meningkatkan komunikasi antar pihak, serta melakukan bimbingan teknis yang intensif untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan aplikasi yang relevan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program ketahanan pangan di desa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Pemerintah Desa Lumbungsari, disarankan agar meningkatkan alokasi anggaran untuk program ketahanan pangan guna mendukung pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana pertanian yang memadai. Selain itu, pemerintah desa perlu mengadakan pelatihan rutin bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dalam penggunaan teknologi informasi dan aplikasi pertanian, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam mengelola lahan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui

forum diskusi dan sosialisasi mengenai pentingnya inovasi dalam pengelolaan lahan dan ketahanan pangan.

- b. Untuk masyarakat Desa Lumbungsari disarankan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya ketahanan pangan dengan aktif berpartisipasi dalam program-program pemerintah desa, serta proaktif mengelola lahan yang ada dengan menerapkan teknik pertanian inovatif dan berkelanjutan, sambil menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah desa dan dinas terkait untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan.
- c. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai ketahanan pangan di Desa Lumbungsari.

DAFTAR REFERENSI

- Alfiah, N. I., & Tini, D. L. R. (2022). Inovasi pemerintah Desa Lobuk dalam mewujudkan desa mandiri dan berkelanjutan. *Jurnal Social and Government*, 17(1), Juni.
- Alfons, M. (2017). Implementasi hak kekayaan intelektual dalam perspektif negara hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Anatan, L., & Ellitan, L. (2009). *Manajemen inovasi: Transformasi menuju organisasi kelas dunia*. Bandung: Alfabeta.
- Armelin, Y., Utama, R. S., & Wibowo, R. F. S. H. (2023). Digitalisasi desa berbasis aplikasi "Simpeldesa": Inovasi dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan di Desa Cibiru Wetan. *Social and Government*, 4(5).
- FAO. (2003). *WTO agreement on agriculture: The implementation experience – Developing country case studies*.
- Fathur Rahman, J. S. (2020). *Inovasi pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan daerah ideal*. Malang: Intrans Publishing.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. (2012). *Organisasi: Perilaku, struktur, proses*.
- Greenberg, J., & Baron, R. A. (2005). *Behavior in organizations: Understanding and managing the human side of work*. Boston: Allyn & Bacon.
- Hakim. (2014). *Dinamika manajemen sumber daya manusia dalam organisasi*. Semarang: EF Press.
- Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Ndraha, T. (2010). *Metodologi ilmu pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.

- Rismawan, K. E., & Sunarti, N. (2021). Pengaruh inovasi kepala desa terhadap pembangunan di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh*, 1(1).
- Surakhmad, W. (1985). *Pengantar penelitian ilmiah: Dasar, metode, dan teknik*. Bandung.
- Sutarno. (2012). *Serba-serbi manajemen bisnis (Edisi 1)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suwarno, Y. (2008a). *Penilaian kinerja*. Palangka Raya: Bintek Organisasi dan Metode.
- Suwarno, Y. (2008b). *Inovasi di sektor publik*. Jakarta: STIA-LAN Press.
- Trott, P. (2008). *Innovation management and new product development*. Pearson Education.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.